

Tertibkan Bangunan Liar, Satpol PP Dapat Perlawanan dari Pemilik

GUNUNG SINDUR (IM)- Meski sempat terjadi penolakan, beberapa bangunan tanpa izin di Kampung Bulaksaga, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor berhasil ditertibkan Satpol PP.

Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarsid mengatakan, pihaknya yang memimpin operasi gabungan berhasil menertibkan 5 bangunan tak berizin di wilayah Kecamatan Gunung Sindur. "Hari ini yang dieksekusi ada 5 bangunan, dengan catatan tidak bisa membuktikan dan tidak memiliki perizinan," ungkapnya kepada wartawan, Kamis (16/2).

Cecep Imam mengatakan, saat penertiban, para pemilik bangunan sempat melawan dengan meminta kebijakan waktu. "Karena proses ini bukan satu kali ini, tapi ini berproses sudah cukup panjang, kurang lebih tujuh bulan yang lalu, melalui proses mekanisme yang berlaku," terangnya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat yang akan mendiri-

kan bangunan, untuk segera melengkapi persyaratan yang berlaku. "Saya mengimbau terhadap pemilik, saat membangun harus sesuai ketentuan yang berlaku,

Sementara itu, Kasic-Ops Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara mengatakan, proses penertiban yang dilakukan oleh pihaknya menggunakan alat berat berupa excavato.

"Penggunaan alat berat untuk menertibkan bangunan yang berjumlah 5 bangunan yang terdiri dari, 1 Rumah Makan Padang, 2 Toko Kusen, 1 Toko Peralatan Ternak Unggas dan 1 Bengkel Las," terangnya melalui keterangan tertulis.

Dalam proses penertiban, tambah Rhama, pihaknya pun melibatkan armada mobil truk DJH Kabupaten Bogor untuk pembersihan objek penertiban. Dalam pelaksanaannya, kata Rhama, saat melakukan penertiban, Satpol PP sempat mendapatkan kendala karena ada perlawanan dari pemilik bangunan. ● **gio**

Jalan di Geopark Ciletuh Sukabumi Tertimbun Longsor, Lalu Lintas Lumpuh

SUKABUMI (IM)- Diguyur hujan berhari-hari, ruas jalan Tamanjaya-Palangpang di Tanjangan Cipeucang, Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat, tertimbun tanah longsor, Rabu (15/2) malam. Akibatnya hingga Kamis siang, jalan raya yang menghubungkan beberapa lokasi pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu belum bisa dilintasi.

Manager Pusat Pengendali Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna mengungkapkan, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi.

"Longsor dari tebing dengan ketinggian sekitar 20 meter menimbun jalan sepanjang 25 meter dengan ketinggian 6 meter," ungkap Daeng dalam keterangan tertulis Kamis (16/2).

Menurut Daeng akibat jalan tertimbun longsor arus lalu lintas tidak dapat dilalui baik kendaraan sepeda motor maupun mobil. Material longsor

berupa tanah, bebatuan, hingga pepohonan menghalangi.

Saat longsor terjadi, dilaporkan ada dua unit kendaraan bermotor terjebak. Satu unit sepeda motor Honda Beat dan satu unit truk box dengan plat nomor B 9982 SXS. Pengendara motor dan yang diboncengnya berhasil menyelamatkan diri.

Keduanya Edi (18) dan Siti Nurhuda (30) warga Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, mengalami luka ringan. "Motor saat melintas tertimbun material longsor, hingga saat ini motor masih dicari. Sedangkan yang truk tersangkut kabel telepon dan sudah berhasil dievakuasi," ujar dia.

Saat ini, lanjut Daeng, tim gabungan sedang berupaya membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan. Sebanyak dua alat berat sudah dikerahkan untuk mengevakuasi material longsor. ● **pra**

Perangkat Daerah Diminta Lebih Matang Kalkulasi Biaya dan Perencanaan Kegiatan



Kadis PUPR Kabupaten Bogor, Subiantoro memaparkan kegiatan di lingkungan kerja tahun 2023.

BOGOT (IM)- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan kalkulasi biaya dan perencanaan kegiatan dengan matang guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan kualitas pekerjaan yang baik.

Hal itu diungkapkan Iwan Setiawan saat membuka kegiatan Sosialisasi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Tahun 2023 dan 2024, di Puri Ayuda Resort Megamendung, Kabupaten Bogor, Rabu (15/2).

Iwan Setiawan menegaskan, terkait standar harga jasa konstruksi dan jasa konsultansi tahun anggaran tahun 2023 dan 2024 harus tersosialisasikan dengan baik ke seluruh Perangkat Daerah. Karena sosialisasi ini sangat penting untuk penyempurnaan pelayanan pengadaan barang dan jasa untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

"Harus tersosialisasi dengan baik, sehingga Standar Harga Tertinggi (SHT) bisa tersampaikan dan dibagikan ke seluruh PD. Jadi kegiatan di seluruh Perangkat Daerah perencanaan dan perhitungannya matang. Makanya hari ini saya undang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dari seluruh Perangkat Daerah," ungkap Iwan Setiawan.

Dirinya juga meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat diketahui secara detail. Sehingga potensi adanya kendala dan permasalahan bisa diantisipasi dan diminimalisir.

"Saya minta rinci laporan dari setiap PD, apalagi sudah ada dasar SHT dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jadi akan lebih matang baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya. Saya ingin hari ini persiapan sosialisasi, seluruh SKPD persiapan mulai dari hal kecil seperti ATK, supaya lebih optimal. Persiapannya harus matang agar berbagai kekurangan dan potensi timbulnya permasalahan bisa diantisipasi," terang Plt Bupati Bogor.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Subiantoro menerangkan, Sosialisasi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2023 dan 2024 sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan standar satuan harga jasa konstruksi dan jasa konsultansi.

"Sehingga lebih matang dalam penyusunan anggaran kegiatan perencanaan teknis terkait dengan bidang jasa konstruksi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor," pungkas Subiantoro. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERINGATAN KENAikan TAHTA RAJA KERATON SOLO

Abdi dalem dan kerabat keraton menghadiri tradisi Tinggalan Dalem Jumenengan atau peringatan naik tahta Raja Paku Buwono (PB) XIII di Keraton Kasunanan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/2). Tinggalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan tahta raja ke-19 SIKS Paku Buwono XIII tersebut ditandai dengan tarian sakral Bedhaya Ketawang yang hanya dipentaskan setahun sekali.

TERKAIT HASIL SURVEI IKM UNISRI SOLO

Gibran Minta FX Rudy Tak Terpancing Hasil Survei

Gibran sebelumnya meminta tidak membandingkan kinerjanya dengan pemerintahan sebelumnya. Sebab, dirinya hanya melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. "Jangan dibanding-bandingkan. Ya tidak mungkin, saya baru dua tahun kurang. Tidak mungkin tinggi. Pak Rudy dua periode lho," kata Gibran.

SOLO (IM)- Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka langsung menghubungi Ketua DPC PDI-P sekaligus mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo melalui WhatsApp (WA) terkait hasil survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilakukan Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Jawa Tengah.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini meminta supaya pria yang akrab

disapa Rudy tidak terpancing dengan hasil survei tersebut.

Diketahui, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintahan Gibran Teguh (Teguh Prakosa) dinilai lebih tinggi dibandingkan Pemerintahan Rudy-Purnomo (Achmad Purnomo). "Intinya jangan terprovokasi dengan berbagai informasi dan survei-survei yang seperti itulah. Kalau aku santai wae kok. Beliau juga santai," kata

Gibran, di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (16/2).

Gibran sebelumnya meminta tidak membandingkan kinerjanya dengan pemerintahan sebelumnya. Sebab, kata Gibran, dirinya hanya melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. "Jangan dibanding-bandingkan. Ya tidak mungkin, saya baru dua tahun kurang. Tidak mungkin tinggi. Pak Rudy dua periode lho," kata Gibran saat di Pura Mangunegeran, Kota Solo, Rabu (15/2).

Meski demikian, pihaknya mengaku berterima kasih jika kinerjanya dianggap lebih baik. "Ya maturnuwun. Terima kasih aspirasinya dari warga. Yang jelas pembangunan yang sekarang itu melanjutkan program-program dari Pak Rudy dan Pak Purnomo ya. Jadi bukan program-program saya," ujar dia.

Adapun program-program yang dimaksud yakni pembangunan Pasar Legi, HP 16 Ka-

wasan Semanggi, konsolidasi dengan warga dan sebagainya. "Intinya kontribusinya besar dari Pak Rudy, bagaimanapun dia sebagai mentor dan guru saya," ujar dia.

"Apalagi sekarang ini, Pak Rudy sebagai Ketua DPC kita masih bersinergi," lanjutnya.

Rudy juga menanggapi santai hasil survei yang dilakukan Unisri Solo terkait kepuasan masyarakat terhadap dirinya rendah dibanding Gibran. "Ya jelaslah. Nak Rudy, satu, tidak sekolah. Lantas pengetahuan, ilmu, dari Mas Gibran pengalaman sekolahnya lebih tinggi, dan saya asalnya dari buruh. Beda noh nak saya dari buruh, sekolah STM dinilai masyarakat itu wajar nak bagi saya. Ndak apa-apa," kata Rudy.

Rudy pun menyampaikan, apapun penilaian itu, yang penting dirinya melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan baik tanpa ada persoalan hukum. "Ti-

dad masalah bagi saya. Yang penting saya melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya dan menyelesaikan tugas tanpa ada persoalan-persoalan hukum," ungkap dia.

Survei IKM dilaksanakan selama 10 hari dimulai dari tanggal 1 Februari sampai 10 Februari 2023. Survei melibatkan 560 responden menggunakan teknik wawancara face to face dengan instrument data tertutup (kuisioner).

Distribusi sampel atau responden cukup merata berdasarkan kategori gender, kelompok usia, tingkat pendidikan, sosok rumah tangga dan pekerjaan.

Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Unisri Solo, Suwardi mengatakan data kepuasan masyarakat tahun kedua pemerintahan Gibran lebih tinggi dari Rudy

diperoleh di pertanyaan terakhir setelah menanyakan terkait kinerja tahun kedua Pemerintahan Gibran dan Teguh. ● **pra**

Iwan Setiawan Ingatkan Perencanaan Tahun 2024 Disesuaikan dengan SDGs

BOGOR (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengingatkan jajarannya untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 harus disesuaikan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal ini disampaikannya usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan tahun 2024, di Lorin Hotel, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Rabu (15/2).

"Saya mengingatkan kita harus bekerja dengan baik dalam menyusun perencanaan tahun 2024, yang seharusnya bisa menyesuaikan dengan SDGs. Dan SIPD ini dibuat untuk menyesuaikan arah kebijakan dari pusat," tandas Iwan.

Iwan menambahkan, RKPD tahun 2024 pastinya sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang sudah disepakati kemarin. Jadi penyusunannya harus berpedoman pada RPD, diantaranya kami masih mempertahankan program Samisade.

Untuk diketahui, pada perencanaan tahun ini terdapat perubahan domain dalam penggunaan SIPD, di mana pada tahun sebelumnya menggunakan sipd.kemendagri.go.id maka mulai tahun 2024 sesuai SE MENDAGRI No.600.5.4/48/SJ menggunakan aplikasi sipd-n.kemendagri.go.id. SIPD ini berbasis microservices yang membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil namun tetap saling berkaitan, di breakdown lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya.

Iwan Setiawan juga meminta perencanaan harus dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat melalui rangkaian proses perencanaan elektronik yang efektif, efisien, akuntabel dan saling terhubung. "Pembangunan SIPD ini tentunya mengarah kepada yang lebih baik, mudah dibaca, mudah diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat, karena SIPD sifatnya sudah terbuka, masyarakat bisa dengan mudah mengakses," ujar Iwan Setiawan.

Soal SDM ASN bidang perencanaan, Plt. Bupati Bogor berpesan harus terus kita tingkatkan kapasitasnya, salah satunya melalui bimtek dan lain sebagainya. Dan saya minta SDM yang sudah ditingkatkan kapasitasnya tidak mudah diganti dan tidak diputar-putar.

"Untuk bidang perencanaan harus orang yang sudah matang, cerdas, dan berintegritas kalau pun harus pindah harus ada regenerasi. Yang mengoperasikan SIPD harus yang melek teknologi, bimtek ini harus betul-betul bermanfaat dan menghasilkan output dan outcome yang sesuai harapan," ungkap Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Dalam kesempatan itu Plt. Bupati Bogor didampingi Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, sementara kegiatan bimtek tersebut diikuti jajaran aparatur pada Subag Program dan Pelaporan beserta operator SIPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari hingga Jumat (17/2). ● **gio**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan minta kegiatan tahun 2024 disesuaikan SDGs.

Malu Programnya Tak Jalan, Alasan Lucky Hakim Mundur

INDRAMAYU (IM)- Terungkap alasan Lucky Hakim mengundurkan diri dari jabatan Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat. Pria berusia 45 tahun ini merasa gagal mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu dan memilih mengundurkan diri.

"Alasannya, saya merasa secara pribadi telah gagal dalam mengemban amanah sehingga mengundurkan diri," ungkapnya, Rabu (15/2), Ia mengaku gaji dan fasilitas yang diterima tidak pantas karena kinerjanya tidak sesuai dengan jumlah gaji yang diberikan.

Lucky Hakim menyoroti jumlah take home pay yang diterima per bulan selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu sejak awal 2021.

Jumlah take home pay untuk jabatan Wakil Bupati Indramayu bisa lebih dari Rp 200 juta per bulan. Bahkan untuk biaya makan dan minum seorang Wakil Bupati Indramayu jumlah yang diterima mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan di luar gaji pokok.

Menurut Lucky, jumlah tersebut sangat besar dan tidak pantas karena selama menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu program-programnya belum berjalan dengan baik. Beberapa janji kampanyenya juga belum terealisasi meski sudah dua tahun menjabat. "Ada 99 program Nina-Lucky. Lalu ketika terpilih saya merasa telah gagal karena tidak tercapai," sambung dia.

Lucky Hakim merasa bersalah kepada warga Indramayu hingga memilih mundur dari jabatan Wakil

Bupati Indramayu. "Karena saya merasa digaji, dibayar oleh uang rakyat, khususnya masyarakat Indramayu. Apalagi masyarakat di sana 90 persen petani, nelayan," tegasnya.

Keputusan Lucky Hakim untuk mundur membuat kaget Relawan Lucky Hakim Center (LHC). Diketahui, Lucky Hakim dan Nina Agustina terpilih sebagai Wakil Bupati Indramayu dan Bupati Indramayu periode 2021-2026.

Ketua Koordinator Relawan LHC, Dadi Carmadi, mengatakan dulu hubungan Lucky Hakim dengan Bupati Indramayu sempat tidak akur. Saat itu, sudah muncul keinginan dari Lucky Hakim untuk mundur dari jabatannya. Namun, keinginan itu tidak terealisasi dan Lucky Hakim masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu.

Dadi Carmadi menjelaskan dulu Lucky Hakim merasa bingung karena jarang mendapat delegasi tugas. Ketika terjun ke masyarakat, Lucky Hakim juga jarang memberikan janji karena tidak dapat berbuat banyak di pemerintahan.

Kini Lucky Hakim sudah membatalkan tekad untuk mundur dari Wakil Bupati Indramayu. Diduga, Lucky Hakim mundur karena tidak mampu mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu. Alasan tersebut tertulis dalam surat pengunduran diri Lucky Hakim yang dikirimkan ke DPRD Indramayu dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, serta Bupati Indramayu, tandasnya. ● **pra**